

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, penelitian ini membahas tentang Analisis Pelaksanaan Pengawasan Program DAU di Kota Kupang, dapat disimpulkan:

1. Dana Perimbangan lebih khusus DAU menyumbang kontribusi tertinggi terhadap Pendapatan Daerah Kota Kupang selama tahun 2017-2019. Dimana pada tahun 2017, Dana Perimbangan menyumbang kontribusi paling besar terhadap Pendapatan Daerah yaitu sebesar Rp. 822,687,901,806.00 dengan persentase 71,1%. Di sisi lain, jumlah realisasi Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 649,542,427,000.00. Persentase Dana Alokasi Umum terhadap Dana Perimbangan sebesar 78,9%. Sedangkan Persentase Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Daerah sebesar 56,1%. Pada tahun 2018, Dana Perimbangan menyumbangkan kontribusi tertinggi terhadap penerimaan pendapatan daerah Kota Kupang tahun 2018 sebesar 77,05%. Di mana total Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 648,250,298,541.00. Persentase Dana Alokasi Umum terhadap Dana Perimbangan sebesar 70,82%. Persentase Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Daerah sebesar 55,4%. Pada tahun 2019, Dana Perimbangan menyumbangkan kontribusi paling besar terhadap Pendapatan Daerah sebesar 75,1%. Di mana realisasi Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 674,841,601,000.00. Persentase Dana Alokasi Umum terhadap Dana Perimbangan sebesar 77,1 %. Persentase

Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Daerah sebesar 57,9%. Selama kurun waktu tiga tahun penerimaan DAU di Kota Kupang mengalami kondisi naik-turun (fluktuasi). Hal itu dibuktikan dengan jumlah penerimaan DAU pada tahun 2017 sebesar Rp. 649.542.427.000, menurun ke angka Rp. 648.250.298.541 pada tahun 2018. Kemudian naik kembali ke angka Rp. 674.841.601.000 pada tahun 2019. Pemanfaatan DAU di Kota Kupang digunakan untuk pemenuhan Belanja Tidak Langsung. DAU pada tahun 2017 sebesar Rp. 649.542.427.000 digunakan untuk membiayai Beban Tidak Langsung sebesar Rp. 474.904.702.530. DAU pada tahun 2018 sebesar Rp. 648.250.298.541 digunakan untuk membiayai Beban Tidak Langsung sebesar Rp. 462.337.665.567. DAU pada tahun 2019 sebesar Rp. 674.841.601.000 digunakan untuk membiayai Beban Tidak Langsung sebesar Rp. 482.604.326.601. Terhadap sisa DAU dari penggunaan Belanja Tidak Langsung, dialihkan ke pemenuhan Belanja Langsung.

2. Pihak Inspektorat Kota Kupang selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), melakukan pengawasan realisasi DAU berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari masing-masing SKPD. Dalam menjalankan kegiatan pengawasan tersebut, Inspektorat Daerah Kota Kupang melakukan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). PKPT ini dijalankan ke masing-masing SKPD, tetapi lebih spesifik ke pengelolaan keuangan dengan nominal yang lebih besar. Mekanisme Kegiatan PKPT dibagi menjadi dua yaitu, Penugasan Pengawasan dan

Pelaporan Ikhtisar Hasil Pengawasan. Penugasan pengawasan dibagi dalam dua bagian di antaranya, Persiapan Penugasan Pengawasan, Pelaksanaan Penugasan Pengawasan dan Pelaporan Penugasan Pengawasan. Tiap bagian saling berkorelasi demi menunjang tujuan kegiatan pengawasan yang efektif. Dan untuk pelaksanaannya sendiri sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan SOP yang ditetapkan. Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan merupakan tahap akhir sekaligus merekap seluruh hasil dari proses sebelumnya. Penerapan kegiatan sudah berjalan sesuai dengan SOP yang berlaku.

3. Proses pengawasan DAU tidak begitu menemui banyak kendala. Sistem dan mekanisme yang teroganisir dengan baik memungkinkan pengawasan tersebut, lebih spesifik DAU dapat dijalankan dengan baik. Berkaitan dengan penyelewengan terkait dengan nominal DAU, Inspektorat Daerah Kota Kupang mengajukan rekomendasi keputusan ke Kepala Daerah. Penyelewengan DAU kemungkinan kecil terjadi karena sistem sudah berbasis digital. Melalui SIPKD, pengelolaan keuangan daerah lebih efektif, efisien, transparan dan auditabel. Kendala yang kerap dialami yaitu berkaitan dengan keterlambatan pengiriman laporan keuangan. Dan konsekwensi yang diterima yaitu penundaan penyaluran DAU untuk tahap berikutnya. Ketergantungan terhadap DAU masih begitu tinggi. Penyerapan PAD yang kecil, membuat Pemerintah Daerah menggunakan lebih banyak DAU untuk membiayai kegiatan

pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut dapat dikonfirmasi bahwa fenomena *Flypaper Effect* terjadi di Kota Kupang.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang diberikan ialah:

1. Bagi Inspektorat Daerah Kota Kupang, melihat penerepan pengawasan DAU di Kota Kupang sudah berjalan efektif, efisien dan sesuai SOP maka diharapkan untuk dapat terus mengembangkan dan menjalankan pelaksanaan tata kelola pengawasan yang baik demi menciptakan *good governance*.
2. Bagi Pemerintah Daerah Kota Kupang, mengetahui bahwa fenomena *Flypaper Effect* terbukti terjadi di Kota Kupang, diharapkan pemerintah daerah mampu menggali sumber-sumber potensial daerah yang mampu menunjang PAD, sehingga mampu memperkecil ketergantungan terhadap pendapatan transfer dalam hal ini DAU.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainingrum, Eka, 2017. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Pangkep*, dalam Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar
- Carunia, Mulya Firdausy. *Kebijakan Dan Strategi Penigkatan PAD dalam Pembangunan Daerah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Elisabaeth. 2008. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah serta Analisis Flypaper Effect pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat*, dalam Skripsi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Halim, Abdul dan Kusufi. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Keempat*. Jakarta: Salemba Empat
- Herwanti, Titiek. 2018. *Analisis Permasalahan Pengelolaan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus pada Pemerintah Daerah*. Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan Vol 1(2)
- Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Jakarta: Erlangga
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Maimunah, Mutiara. 2006. *Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatra*. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Ndadari, Laras Wulan dan Adi, Priyohari. 2008. *Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah terhadap Transfer Pemerintah Pusat*. The 2nd National Conference UKWMS Surabaya
- Nur, Annisa Islamiyah. 2017. *Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan*, dalam Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar

- Oktavia, Deni. 2014. *Flypaper Effect: Fenomena Serial Waktu dan Lintas Kabupaten Kota di Jawa Timur 2003-2013*. Jurnal Akuntansi Universitas Jember. Vol 12. No.2
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Dan Dana Otonomi Khusus
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern Di Lingkungan Menteri Keuangan
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 18 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Menteri Keuangan Sebagai Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam Kepemilikan Negara Yang Dipisahkan
- Peraturan Walikota Kupang Nomor 25 Tahun 2015
- Pratama, Rizky. 2002. *Kebijakan UU No. 1 Tahun 2002 Mengenai Perimbangan Keuangan Antar Pusat dan Daerah Pasca Reformasi*. Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan
- Rahmatul Mulya, dan Bustaman. 2016. *Pengaruh Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Banda Aceh (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2008-2014)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol.1 No.2
- Riyanto. 2013. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta:BPFE
- Rosidin, Utang. 2012. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia
- Siregar, Baldric. 2017. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Siswandi, dan Indra Iman. 2009. *Aplikasi Manajemen Perusahaan (edisi Kedua)*. Jakarta: Mitra Wicana Media
- Suparmoko. 2005. *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Andi. Yogyakarta

Suparmoko. 2010. *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*.
Yogyakarta: Andi

Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor 25 Tahun 2015

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Undang-undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

www.djpk.depkeu.go.id, diakses pada tanggal 28 Oktober 2022